BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laba merupakan indikator yang sering digunakan dalam menilai kinerja perusahaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, serta menjadi perhatian oleh para *stakeholder*.Laba memiliki potensi informasi yang sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal pada suatu perusahaan karena laba merupakan hasil dari pendapatan dikurang biaya. Laba yang yang tinggi akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang baik. Oleh karena itu untuk mendapatkan penilaian yang baik, maka kecenderungan untuk melakukan manajemen labaakan semakin besar.

Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2019 adalah kasus PT Garuda Indonesia.Dimana dalam kasus ini, informasi laba yang disajikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. PT Garuda Indonesia terbukti melakukan tindakan kecurangan dengan memanipulasi laba pada periode tahun 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibandingkan dengan tahun 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta.Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairil Tanjung dan Dony Oskaria, menganggap bahwa laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya,

Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berplat merah tersebut.PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan.Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut.Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional). Dalam hal kasus tersebut PT Garuda Indonesia terbukti melakukan tindakan Manajemen Laba melalui *discretionary accruals*. Dimana, utang dari PT Mahata Aero Teknologi yang belum dibayarkan, telah diakui oleh PT Garuda sebagai keuntungan, sehingga laba PT Garuda akan terlihat lebih tinggi, meskipun besaran laba yang diterima tidak sesuai dengan laba secara fisik.

Kasus-kasus tentang praktik Manajemen Laba yang dilakukan oleh perusahaan telah banyak terjadi dan masih banyak kasus yang belum terungkap ke publik, namun kasus yang telah terungkap salah satunya adalah PT Garuda Indonesia tersebut di atas.Berkaitan dengan hal tersebut maka saya tertarik untuk meneliti tentang Manajemen Laba.

Pemisahan antara pemilik (*principal*) dan kepentingan manajemen (*agent*) memiliki sisi yang negatif, dimana keleluasaan manajemen untuk memaksimalkan laba akan mengarah kepada proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan biaya yang akan ditanggung oleh pemilik perusahaan.Konflik kepentingan ini semakin meningkat, terutama karena *principal* tidak memiliki

informasi mengenai aktivitas manajemen sehari-hari untuk memastikan bahwa manajemen bekerja sesuai dengan keinginan pemilik.

Menurut Schipper (Sulistyanto, 2014):

> **"Manajemen Laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses".**[2]

Manajemen Laba dapat terjadi karena penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar akrual. Sistem akuntansi akrual sebagaimana yang ada pada prinsip akuntansi yang diterima umum memberikan kesempatan kepada manajer untuk membuat pertimbangan akuntansi yang akan memberi pengaruh kepada pendapatan yang dilaporkan. Dalam hal ini, Manajemen Laba diukur dengan menggunakan pendekatan *discretionary accruals*.*Discretionary Accrual* adalah bentuk kebijakan akrual yang bukan karena kebutuhan dari kondisi perusahaan namun dilakukan oleh pihak manajemen untuk menggeser biaya dan pendapatan dari satu periode ke periode lainnya sehingga tujuan tertentu manajemen dapat terpenuhi.*Discretionary Accrual* merupakan suatu cara yang efektif untuk mengurangi pelaporan laba, dimana cara tersebut sulit untuk dideteksi dan digunakan untuk memanipulasi kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan akrual. Penentuan *discretionary accruals* dengan maksud untuk menaikkan atau menurunkan laba merupakan tindakan Manajemen Laba *(Earnings Management).*

---

[2] Sulistyanto, Sri,**Manajemen Laba Teori dan Model Empiris**, Cetakan 2, PT. Gramedia, Jakarta, 2014, Hal. 49

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedekatan *discretionary accrual* untuk mengukur manajemen laba karena pendekatan *discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang berasal dari manajemen laba yang dilakukan oleh manajer.*Discretionary Accrual* juga menyajikan total akrual dan *nondiscretionary accrual* dari beberapa perubahan aktivitas setiap tahunnya. Akrual diskresioner tidak bisa diobservasi secara langsung dari laporan keuangan melainkan malalui beberapa tahap baik itu total akrual maupun non *discretionary accrual.*

Kondisi terjadinya tindakan manajemen laba tidak dapat dipungkiri, sebagai dampak semakin besar dan luasnya usaha yang harus dikelola pemilik, sehingga pemilik (*shareholders*) tidak lagi mampu mengelola usahanya secara langsung.Pemberian wewenang terhadap manajemen tersebut memberikan dampak dan konsekuensi bahwa adanya pemisahan kewenangan dan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen *(agent),* akan menimbulkan permasalahan keagenan *(agency problem).*

Masalah keagenan tersebut timbul sebagai akibat dari sifat oportunistik manajemen *(agent*) yang cenderung untuk lebih mengutamakan kesejahteraannya yang bertentangan dengan tujuan *principal*.Kesuksesan perusahaan dalam mencapai kinerja *(performance)* dianggap manajemen (*agent*) sebagai hasil kinerja mereka sendiri tanpa melihat kontribusi yang besar dari pihak lain yang salah satunya adalah pemilik. Dalam hubungannya dengan keagenan, beberapa ahli mengemukakan bahwa keberadaan agen dan prinsipal merupakan salah satu faktor yang menjadi dasar timbulnya teori keagenan *(agency theory).*Masalah ini

dilatarbelakangi oleh adanya asimentri informasi antara prinsipal (*owner)* dan agen (*manager*).Prinsipal memberikan kewenangan penuh terhadap pengawasan operasional perusahaan terhadap agen sehingga memberikan peluang kepada agen untuk melakukan praktik manajemen laba.Adanya *asymmetric information*tersebut memberi peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba.

Untuk mencegah Manajemen Laba yang berlebihan, penerapan *Good Corporate Governance*atau tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan.Dengan adanya *Good Corporate Governance (GCG),*dapat membantu para pengguna informasi keuangan untuk lebih yakin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan bebas dari pelanggaran *(fraud).*Struktur *Corporate Governance*yang baik dapat mengurangi manajemen laba.*Corporate Governance*muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.Dampak dari *good corporate governance* ini dapat dilihat dengan pembentukan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Sekretaris Dewan Komisaris pada perusahaan-perusahaan publik, terutama yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Halini didasarkan pada peraturan yang telahditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam Keputusan Ketua **Bapepam No. Kep-643/BL/2012** dan **Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo. 55/POJK.04/2015**tentangPembentukandanPedomanPelaksanaanKerja Komite Audit. Dalam Peraturan ini secara jelas disebutkan dalam poin 1 bagian (b) bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit. Komite Audit

adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rmembantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Praktik *Good Corporate Governance (GCG)*menunjukkan bahwa pembentukan komite audit sebagai sebuah titik pusat dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Selain itu, Bapepam juga menegaskan bahwa adanya Komite Audit, sangat membantu para Dewan Komisaris untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan.

Peran Komite Audit seringkali dihubungkan dengan kualitas pelaporan keuangan karena dapat membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi.

5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau perusahaan publik; dan
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Dalam hal ini, Komite Audit bekerja untuk membantu Dewan Komisaris menelaah laporan keuangan perusahaan dalam rangka menjaga agar laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen memiliki kualitas yang tinggi dan terhindar dari benturan kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan sendiri, salah satunya melalui tindakan Manajemen Laba.

Ukuran Komite Audit adalah jumlah seluruh anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan.Jumlah anggota Komite Audit memiliki kaitan yang erat dengan seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk menghadapi permasalahanyang dihadapi perusahaan.Di dalam keputusan ketua Bapepam No.Kep-643/BL/2012 poin (2) menyebutkan bahwa “Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orangKomisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik”. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah anggota Komite Audit adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Ukuran Komite Audit diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu dengan menghitung jumlah anggota Komite Audit yang tercantum dalam laporan perusahaan tersebut.

Komite Audit Independen merupakan anggota Komite Audit yang tidak berasal dari pihak terafiliasi.Independensi Komite Audit dilihat dari seberapa banyak anggota Komite Audit yang berasal dari pihak luar atau tidak memiliki hubungan atau benturan kepentingan dengan pihak perusahaan.Di dalam

keputusan ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2012 poin (3) menyebutkan bahwa“Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai ketua Komite Audit.Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua Komite Audit”. Dari UU tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa anggota Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dikatakan independen karena di dalam anggota Komite Audit tersebut diperankan oleh sekurang-kurangnya satu orang dari Komisaris Independen (Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik, dan tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan) dan yang lainnya berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik. Independensi Komite Audit diukur dengan menggunakan skala rasio.Semakin tinggi independensi Komite Audit maka kualitas pelaporan keuangan akan semakin baik dan sehingga tindakan manajemen untuk mementingkan kepentingkan manajemen akan semakin kecil.

Frekuensi pertemuan Komite Audit merupakan jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh Komite Audit dalam waktu satu tahun.Dalam Peraturan Otoritas Jasa Kuangan No. 55/POJK.04/2015 menyebutkan bahwa “Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan”. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah pertemuan Komite Audit adalah paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun.Frekuensi Pertemuan Komite Audit diukur dengan menggunakanskala rasio, yaitu dengan menghitung jumlah rapat yang dilakukan

oleh Komite Audit dalam periode satu tahun.Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan akan meningkatkan efektivitas Komite Audit dalam mengawasi manajemen agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri.

Penelitian mengenai kualitas Komite Audit telah banyak dilakukan pada tahun tahun sebelumnya.Beberapa penelitian terdahulu telah berhasil membuktikan keterkaitan antara Karakteristik Komite Audit dengan praktik Manajemen Laba. Erna Widiastuty (2016) memberikan bukti empiris bahwaFrekuensi Pertemuan Komite Audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Manajemen Laba, sedangkan karakteristik Komite Audit yang lain tidak berpengaruh signifikan terhadapManajemen Laba.

Penelitian yang dilakukan Anindyah Prastiti, Wahyu Meirant (2013) memberikan bukti empiris bahwa bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris, independensi Dewan Komisaris, dan independensi Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen Laba. Sedangkan karakteristik-karakteristik lain (keahlian keuangan Dewan Komisaris, Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, keahlian keuangan Komite Audit, dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit) tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Variabel ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variabel kontrol terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Laba.

Penelitian oleh Novita Dwi Permanasari (2015) menyatakan bahwa Hasil dari analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Independensi Komite Audit dapat mempengaruhi praktik Manajemen Laba. Sedangkan Ukuran Komite Audit dan Frekuensi Pertemuan atau Rapat Komite Audit tidak dapat mempengaruhi

praktik Manajemen Laba.Hal tersebut didukung juga oleh penelitian Trihartati (2008) yang menguji pengaruh karakteristik Komite Audit terhadap Manajemen Laba. Hasil penelitian ini adalah bahwa independensi secara signifikan berpengaruh negatif terhadapManajemen Laba.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Afifa Nabila (2013) membuktikan bahwa variabel aktivitas Komite Audit, Ukuran Komite Audit, dan reputasi auditor terbukti tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan semakin besar proporsi komisaris independen maka Manajemen Laba akan semakin berkurang.

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menguji apakah karakteristik Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Adapun objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah *Annual Report* perusahaan manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia sebagai objek penelitian, karena peneliti melihat bahwa pada beberapa perusahaan industri tersebut menyajikan presentase kenaikan dan penurunan laba setiap tahunnya sangat signifikan. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji apakah kenaikan dan penurunan laba yang signifikan sesuai dengan fakta yang ada dan tanpa adanya benturan kepentingan untuk memaksimalkan keuntungannya melalui tindakan Manajemen Laba, dilihat dari aspek karakteristik Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Komite Audit**

Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkanuraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini, antara lain :

1. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba?
2. Apakah Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba?
3. Apakah Frekuensi Pertemuan Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris bahwa karakteristik yang ada pada Komite Audit, yaituUkuran Komite Audit, Independensi Komite Audit dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit berpengaruh terhadapManajemen Laba yang diukur dengan pendekatan *Discretionary Accrual* (DA) untuk mengukur adanya penyimpangan dalam Manajemen Laba.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperdalam pemahaman mengenai Pengaruh Karakteristik yang ada pada Komite Audit yang dapat mempengaruhi Manajemen Laba.

2. Bagi Perusahaan

   Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat dalam memahami Karakteristik Komite Audit terhadap praktik Manajemen Laba.

3. Bagi Pembaca

   Menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi atau acuan dalam karya ilmiah tentang Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba.

4. Universitas HKBP Nommensen

   Menjadikan penelitian ini sebagai pedoman bagi mahasiswa yang akan mengerjakan skripsi untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Agensi

Penelitian mengenai Komite Audit ini dilandasi oleh *agency theory* (teori agensi).Teorikeagenan menjelaskan dan memprediksi perilaku dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan.

MenurutSilaban dan BerlianaLumbanGaol :

> **"Teori keagenan didasarkan pada hubungan antara pemilik (*Principal*) dan manajemen (*Agent*). Prinsipal melimpahkan kewenangan untuk mengelola perusahaan kepada agen. Secara legal, agen merupakan individu atau personel yang dipekerjakan untuk mewakili kepentingan pihak lain".**[3]

Dalam*agency theory*, adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik. Terjadinya konflik yang disebut *agency conflict* disebabkan karena pihak-pihak yang terkait yaitu*principal*(yang memberi kontrak atau pemegang saham) dan *agent* (yang menerima kontrak dan yang mengelola dana prinsipal) mempunyai kepentingan yang saling bertentangan.

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal*dan *agent*.Jika agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan

---

[3] Silaban, Adanan dan Berliana Lumban Gaol, **Teori Akuntansi Konsep Pelaporan Keuangan**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2019, Hal. 41

motivasi yang berbeda, maka ada alasan untuk percaya bahwa agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan *principal*.

Masalah keagenan akan muncul jika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dijalankan secara terpisah. Manajer yang bertindak sebagai pengelola dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki ini, manajer tidak bertindak terbaik untuk kepentingan pemilik, karena adanya perbandingan kepentingan (*conflict of interest*).

Pemikiran bahwa pihak manajemen dapat melakukan tindakan yang hanya memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri didasarkan pada suatu asumsi yang menyatakan setiap orang mempunyai perilaku yang mementingkan diri sendiri atau *self-interested behaviour*.Keinginan,motivasi, dankepentinganyangtidaksamaantaramanajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinanmanajemen bertindak merugikan pemegang saham, antara lain berperilaku tidak etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi .

Akibat perbedaankepentinganinilah, masing-masing pihak (Prinsipal dan Agen) berusaha memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri.*Principal*menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi, yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki. *Agent* menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi yang memadai dansebesar-besarnya atas kinerjanya.*Principal*menilai prestasi *agent*berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Semakin tinggi

tingkat laba, harga saham dan tingkat pengembalian deviden juga akan semakin tinggi pula. Pada kondisi ini, maka *agent*dianggap berhasil dan berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi.

Sebaliknya, *agent*pun memenuhi tuntutan *principal* agar mendapatkan kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka *agent*dapat memainkan beberapa kondisi perusahan agar seolah-olah target tercapai. Permainan tersebut bias terjadi atas prakarsa dari *principal*ataupun inisiatif *agent* sendiri.Maka terjadilah akuntansi yang menyalahi aturan seperti adanya piutang yang tidak mungkin tertagih yang tidak dihapuskan, kapitalisasi biaya yang tidak semestinya atau pengakuan penjualan yang tidak semestinya. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan melakukan *income smoothing* (membagi keuntungan ke periode lain) agar setiap tahun, perusahaan kelihatannya meraih keuntungan, padahal kenyataannya rugi.

2.2*Good Corporate Governance (GCG)*

2.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*(GCG)

Menurut Prakarsa (Sukrisno, 2014) :

"GCG sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok kepentingan yang lain".[4]

Hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan

---

[4] Sukrisno, Agoes**, Etika Bisnis dan Profes**i, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2014, Hal. 102

perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance*adalah serangkaianproses, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi.Tata kelola ini mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan.Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah Pemegang Saham, Manajemen, dan Dewan Direksi serta pemangkukepentingan termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.

2.2.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa azas *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.Sehubungan dengan itu, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan asas-asas dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Transparansi *(Transparency)*

   Transparansi diartikan sebagai kewajiban bagi para pengelola perusahaan untuk menjalankan keterbukaandalam penyampaian informasisebagai alat pengambilan keputusan. Keterbukaan dalam penyampaian informasi juga mengandung arti, bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar,

dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan.Tidak boleh ada hal hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda.

2. Akuntabilitas *(Accountability)*

   Akuntabilitas adalah prinsip dimana para pengelola perusahaan berkewajibanuntuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuanganyangdapatdipercaya.Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas *(Responsibility)*

   Responsibilitas Adalah prinsip tanggungjawab dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.Prinsip tanggungjawab ada sebagai konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan.

4. Independensi *(Independency)*

   Untuk melancarkan pelaksanaan azas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara Independen yang bersifat professional, mandiri, serta bebas dari konflik kepentingandan tekanan dari manapun,

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan *(Fairness)*

Dalammelaksanakankegiatannya operasionalnya,perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Tanggung jawab ini mempunyai lima dimensiyaitu: dimensi ekonomi, dimensi hukum, dimensi moral, dimensi sosial, dan dimensi spiritual.

Untuk mencegah terjadinya tindakanManajemen Laba yang berlebihan, penerapan *Good Corporate Governance*sangat diperlukan.Dengan adanya *Good Corporate Governance*dapat membantu para pengguna informasi keuangan untuk lebih yakin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan bebas dari pelanggaran *(fraud).*Struktur *Corporate Governance*yang baik dapat mengurangi praktikManajemen Laba yang dilakukan oleh manajemen.*Corporate Governance*muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.Dampak dari *Good Corporate Governance*ini dapat dilihat melalui pembentukan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Sekretaris Dewan Komisaris pada perusahaan terutama pada perusahaan publik yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.3 Manajemen Laba

2.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Secara umum, Manajemen Laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakholders* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

Menurut Schipper (Sulistyanto, 2014):

> **"Manajemen Laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses".**[5]

Ada 2 perspektif penting yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan mengapa manajemen laba dilakukan oleh seorang manajer, yaitu perspektif informasi dan oportunis. Kedua perspektif ini mempunyai hubungan sebab akibat yang mendorong terjadinya Manajemen Laba. Artinya, Manajemen Laba sebenarnya merupakan upaya oportunis seseorang untuk mempengaruhi informasi yang disajikannya dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain mengenai informasi yang sebenarnya. Upaya mempengaruhi informasi itu dilakukan dengan memanfaatkan kebebasan untuk memilih, menggunakan, dan mengubah berbagai metode dan prosedur akuntansi yang ada.

Manajemen Laba dapat dikatakan sebagai permainan akuntansi *(Accounting games).* Apalagi, jika melihat bahwa rekayasa ini merupakan upaya untuk menyembunyikan dan mengubah informasi dengan mempermainkan besar

---

.[5] Sulistyanto, Sri, **Op. Cit**.

kecilnya angka-angka komponen laporan keuangan yang dilakukan ketika mencatat dan menyusun informasi itu. Ada 2 alasan yang dapat menjelaskan mengapa laporan keuangan rawan untuk dipermainkan oleh siapapun yang menyusun informasi itu. Alasan pertama adalah, hanya dengan memahami dan menguasai konsep-konsep akuntansi dan keuangan seseorang dapat mempermainkan informasi keuangan ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Alasan kedua adalah, kebebasan dalam memilih dan menggunakan metode dan prosedur akuntansi ini secara tidak langsung membuat Standar Akuntansi seakan-akan mengakomodasi atau memfasilitasi aktivitas rekayasa manjerial ini.

2.3.2 Motivati dalam Manajemen Laba

MenurutSulistyanto, terdapat beberapa alasan mendasar mengapa manajer melakukan manajemen laba.Beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan *earning management* atau manajemen laba, antara lainsebagai berikut:

1. Motivasi Pasar Modal

   Faktor yang mempengaruhi studi pasar modal adalah perkembangan pasar modal itu sendiri.Perkembangan pasar modal ini sebenarnya merupakan dampak dari perubahan orientasi dunia usaha.Saat ini, dunia usaha telah mengalami perubahan orientasi dalam mencari dana. Dunia usaha tidak lagi menggantungkan diri pada perbankan atau lembaga keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan dan operasional dan investasi, namun lebih menyukai dana yang diperoleh dari pasar modal.

2. Penawaran Saham Perdana

   Penawaran saham perdana atau *intial publik offerings*(IPO) merupakan penawaran saham suatu perusahaan *private* untuk pertama kalinya kepada publik.Hal inilah yang membuat pemilik mempunyai hak dan tanggung jawab yang tidak terbatas dalam perusahaan.Artinya, pemilik dapat menikmati seluruh keuntungan yang diperoleh perusahaan seorang diri sekaligus harus menanggung resiko yang kemungkinan muncul.

3. Motivasi Kontraktual

   Profesionalisme pengelolaan perusahaan akan muncul seandainya setiap pihak menjalankan perannya masing-masing tanpa mengintervensi kepentingan pihak lain. Sebaliknya, permasalahan agensi akan muncul seandainya ada pihak yang mendahulukan kepentingan pribadi dengan mengintervensi kepentingan pihak lain. Permasalahan inilah yang memicu konflik kepentingan antar manajer dan pemilik perusahaan.

4. Motivasi Regulasi

   Dalam konteks hubungan agensi antara perusahaan dan pemerintah, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah pajak yang ditentukan dengan menggunakan laba sebagai dasar perhitungannya.Sebaliknya, pemerintah mempunyai hak untuk menerima pembayaran pajak perusahaan itu. Sedangkan hak yang akan diterima perusahaan berupa rasa aman dan pelayanan publik dalam menjalankan usahanya.

Di samping itu, manajemen laba khususnya dalam pola perataan laba juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengkomunikasikan informasi privat *(private information)*perusahaan. Manajemen laba juga dapat dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu yang lain, misalnya dalam rangka mendapatkan bonus berbasis laba,menghindari pelanggaran kontrak utang, dan menghindari biaya politis *(political cost)* pada waktu perusahaan mendapatkan laba yang tinggi.

2.3.3 Bentuk-Bentuk Manajemen Laba

Ada beberapa bentuk manajemen laba yang sering dilakukan manajer dalam laporan keuangan, yaitu:

1. *Taking a bath*

   Terjadi apabila perusahaan harus melaporkan laba yang tinggi. Manajer dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi, konsekuensinya manajer akan menghapus aktiva dengan harapan laba yang akan datang dapat meningkat. Bentuk ini mengakui adanya biaya pada periode yang akan datang sebagai kerugian pada periode berjalan, ketika kondisi buruk yang tidak menguntungkan tidak dapat dihindari pada periode tersebut. Untuk itu, manajemen harus menghapus beberapa aktiva dan membebankan perkiraan biaya yang akan datang pada saat ini serta melakukan *clear the desk*, sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang meningkat.

2. *Income minimization*

   Bentuk ini mirip dengan"*taking a bath"*, tetapi lebih sedikit ekstrim, yakni dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan

mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya.Pada saat tingkat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis, kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, hasil akuntansi untuk biaya eksplorasi.

3. *Income maximization*

   Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan *Net Income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar.Perencanaan bonus yang didasarkan pada data akuntansi ini, mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus tahunan.Jadi tindakan ini dilakukanpada saat laba menurun. Perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang mungkin akan memaksimalkan pendapatan.

4. *Income smoothing*

   Bentuk ini mungkin yang paling menarik.Hal ini dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

2.3.4 *Discretionary Accrual*

Salah satu pengukuran Manajemen Laba adalah dengan menggunakan pendekatan model modifikasi Jones. Jones mengembangkan model *earning management* dengan membagi total akrual perusahaan dengan tingkat akrual yang abnormal atau (*Discretionary Accrual).Discretionary Accrual* adalah bentuk

kebijakan akrual yang bukan karena kebutuhan dari kondisi perusahaan namun dilakukan oleh pihak manajemen untuk menggeser biaya dan pendapatan dari satu periodeke periode lainnya sehingga tujuan tertentu manajemen dapat terpenuhi.*Discretionary Accrual*merupakan suatu cara yang efektif untuk mengurangi pelaporan laba, dimana cara tersebut sulit untuk dideteksi dan digunakan untuk memanipulasi kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan akrual.

Manajemen Laba dapat terjadi karena penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar akrual. Sistem akuntansi akrual sebagaimana yang ada pada prinsip akuntansi yang diterima umum memberikan kesempatan kepada manajer untuk rnembuat pertimbangan akuntansi yang akan memberi pengaruh kepada pendapatan yang dilaporkan. Dalam hal ini,pendapatan dapat dimanipulasmelalui *discretionary accruals*.

Manajemen laba melalui *discretionary accruals* sering terjadi pada perusahaan-perusahaan berskala besar dengan laba yang terbilang tingi. Tindakan ini dilakukan dengan membukukan pendapatan yang masih belum diterima dari pihak yang lain yang memiliki utang kepada perusahaan terkait. Salah satunya pada tahun 2019, PT Garuda Indonesia terbukti melakukan tindakan kecurangan dengan memanipulasi laba pada periode tahun 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibandingkan dengan tahun 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta.Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua

komisaris Garuda Indonesia yakni Chairil Tanjung dan Dony Oskaria, menganggap bahwa laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut.PTMahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan.Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut.Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional).

Pengukuran Manajemen Laba dilakukan dengan menggunakan Pendekatan *Discretionary Accrual (DA).*Penggunaan pendekatan *Discretionary Accrual (DA*) sebagai alat ukur Manajemen Laba dihitung dengan menggunakan *Modified Jones Model.*Menghitung *Discretionary Accrual (DA)* dapat dilakukan dengan persamaan berikut :

$$\mathbf{DAC_{it}} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - \mathbf{NDA_{it}}$$

2.4Komite Audit

2.4.1 Pengertian Komite Audit

Berdasarkankeputusan ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004 menyebutkan bahwa : **“Komite audit adalah komite yang**

dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu dan melaksanakan tugas dan fungsinya".[6]

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *Good Corporate Governance*(GCG) yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannyadiharapkan mampu meningkatkankualitaspengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balanc*es, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

2.4.2 Tugas dan Wewenang Komite Audit

2.4.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

MenurutKeputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit poin (3) menyebutkan bahwa : Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

7. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.

---

[6] Keputusan ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004, tentang **Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit**

8. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
9. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
10. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi.
11. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau perusahaan publik; dan
12. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

2.4.2.2 Wewenang Komite Audit

MenurutKeputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit poin (3) menyebutkan bahwa : “Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya”. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

2.4.3Syarat–Syarat Komite Audit

MenurutKeputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit poin (3)

menyebutkan bahwa Persyaratan keanggotaan Komite Audit antara lain, sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Bukan merupakan orang dalam kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

8. Tidak mempunyai :
   a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama emiten atau perusahaan publik ; dan atau
   b) Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha emiten atau perusahaan publik.

2.4.4 Karakteristik Komite Audit Dan Hubungannya Dengan Manajemen Laba

Adapun karakteristik Komite Audit dan hubungannya dengan manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit adalah jumlah seluruh anggota komite audit. Jumlah anggota komite audit memiliki kaitan yang erat dengan seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk menghadapi permasalahanyang dihadapi perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015Tentang Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit Bab II pasal (4) menyebutkan bahwa : “Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik”**.** Komite audit haruslah memiliki jumlah yang memadai untuk mengemban tanggungjawab pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas manajemen puncak.

Dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite audit terhadap pihak manajemen. Selain dapat meningkatkan fungsi pengawasan, ukuran komite audit yang besar juga akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan semakin lebih terjamin. Besarnya ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba.Ukuran Komite Audit dapat dihitung dengan rumus berikut :

ACSIZE = Jumlah Komite Audit

2. Independensi Komite Audit

Komite audit independen diperlukan dalam monitoring manajemen laba. Peran monitoring akan semakin kuat dengan keterlibatan auditor yang berkualitas. Komite audit independen adalah jumlah komite audit yang independen dalam suatu perusahaan.Dalamkeputusanketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004, dinyatakan bahwa Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai komite audit. Dalam hal komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Anggota komite audit independen adalah anggota dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan langsung kepada perusahaan. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit yang independen diharapkan kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

Semakin independen anggota tersebut, maka kualitas pelaporan keuangan oleh perusahaan lebih dapat dipercaya. Independensi yang dimiliki oleh komite audit dapat meminimalisasi adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen.Independensi Komite Audit diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ACINDP} = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit independen}}{\text{Jumlah anggota komite audit}}$$

3. Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Karakteristik komite audit berikutnya adalah frekuensi pertemuan yang dilakukan oleh komite audit. Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan,akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri. Komite audt mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam POJK No.55/POJK-04/2015menyebutkanbahwaKomiteAuditmengadakanrapatsecaraberkalapaling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.RapatKomite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingan sendiri. Semakin tinggi tingkat frekuensi

ACMEET = JumlahPertemuanAnggota Komite Audit dalam 1 Tahun

pertemuan dapat meminimalisasi manajemen laba.Frekuensi Komite Audit diukur dengan rumus sebagai berikut:

2.5Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh para peneliti dan akademisi sebelumnya, untuk menguji bagaimana pengaruh karakteristik komite audit terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan beberapa variabel, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
1	Erna Widiastuty (2016)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Independensi komite audit, Ukuran komite Audit, Financial Expertis, Jumlah pertemuan komite audit.	Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independensi komite audit, financial expertise dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel independen yaitu independensi dan jumlah pertemuan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
2	Anindyah Prastiti, Wahyu Meiranto (2013)	PengaruhKarakteristikDewan Komisaris DanKomiteA	Variabel Dependen: Manajemen Laba	Variabel ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

		uditTerhadap Manajemen Laba	Variabel Independen: Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Keahlian Keuangan Dewan Komisaris, Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris.	Sedangkan karakteristik-karakteristik lain (keahlian keuangan dewan komisaris, frekuensi pertemuan dewan komisaris, ukuran komite audit, keahlian keuangan komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
3	Novita Dwi Permanasari (2015)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Yang Listed Di Bei Tahun 2011-2013)	Variabel Dependen: Praktik Manajemen Laba Variabel Independen: Independensi komite audit, Ukuran Komite Audit, Frekuensi Pertemuan Komite Audit.	Independensi komite audit dapat mempengaruhi praktik manajemen laba. Sedangkan ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan atau rapat komite audit tidak dapat mempengaruhi praktik manajemen laba
4	Afifa Nabila (2013)	Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Laba	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit,	Variabel aktivitas komite audit, ukuran komite audit, dan reputasi auditor terbutkti tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Sejalan dengan penelitian terdahulu di atas, penulis menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Novita Dwi Permanasari(2015)sebagai acuan dalam penelitian ini. Penulis ingin menguji kembali variabel mana yang berpengaruh

atau tidak terhadap manajemen laba dengan periode tahun yang berbeda, yakni 2015-2018.Perbedaannya adalah, penelitian ini menjadikan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sebagai objek penelitian.Hal ini dilakukan karena berdasarkan data laporan tahunan, perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia tersebut menyajikan informasi perubahan laba yang mengalami kenaikan ataupun penurunan secara signifikan selama tahun 2015-2018.

Jika dibandingkan dengan penelitian Novita Dwi Permanasari(2015), penulis lebih banyak menggunakan referensi baru, baik itu dari tenaga pendidik (dosen) maupun referensi lain. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang komite audit dengan UU revisi terbaru.

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teorittis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Dalam pembentukan kerangka berpikir, peneliti menggunakan model Analisis Regresi Berganda. Analisis ini merupakan analisis linear yang digunakan dengan jumlah variabel independen lebih dari 2 (dua) variabel.

Variabel Independen pada penelitian ini adalah Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit, sedangkan variabel Dependen adalah Manajemen Laba.Kerangka pemikiran mengenai hubungan antar variabel-variabel yang telahdijelaskan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis

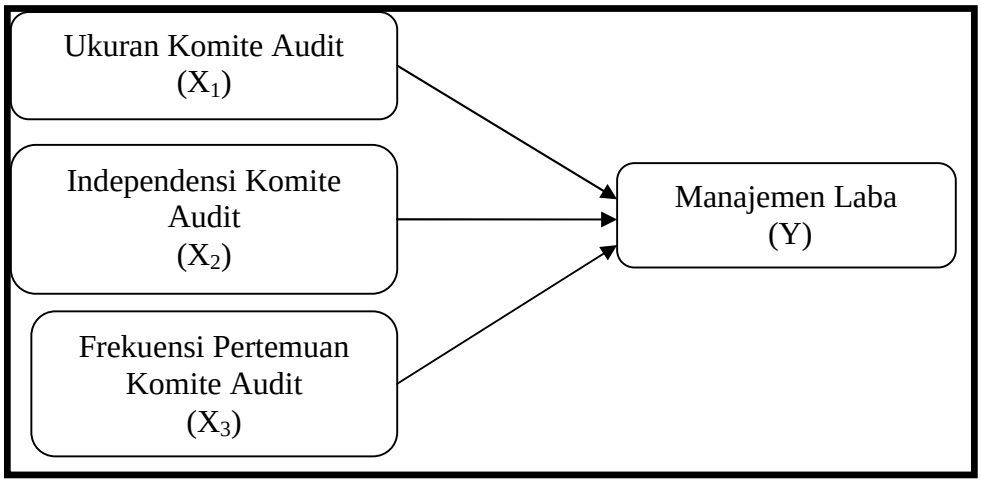

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya mengenai masalah yang sedang dipelajari, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih.

Perumusan hipotesis dapat dikembangkan berdasarkan hubungan antara karakteristik Komite Audit terhadap Manajemen Laba yaitu Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Auditdan Frekuensi Pertemuan Komite Audit.

1. Ukuran Komite Audit (X_1) dan Manajemen Laba (Y)

   Didalamkeputusan ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 poin (2) menyebutkan bahwa “Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik”. Dengan semakin besarnya ukuran komite audit, makaakan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite audit terhadap pihak manajemen.

   Menurut Prastiti (2013) dalam penelitiannya, membuktikan bahwa ukuran komite audit, tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin. Besarnya ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba.

   Untuk menguji hubungan antara ukuran komite audit dan manajemen laba melalui perhitungan *discretionary accrual* dilihat dari hasil uji T Regresi Linear Berganda. Pada hasil uji T tersebut harus menunjukkan nilai signifikansi < 5% atau 0.05, dengan kata lain ukuran komite audit adalah berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

   H_1 : Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

2. HubunganIndependensi Komite Audit (X_2) danManajemen Laba (Y)

Syarat utama anggota Komite Audit adalah Independensi Komite Audit.Anggota Komite Audit Independen adalah anggota dari pihak Independen yang tidak memiliki hubungan langsung kepada perusahaan termasuk Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit yang independen, kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

Novita Dwi Permanasari(2015)dalam penelitiannya membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara independensi komite audit dengan manajemen laba. Karena semakin independen anggota Komite Audit tersebut, maka kualitas pelaporan keuangan oleh perusahaan lebih dapat dipercaya. Independensi yang dimiliki oleh komite audit dapat meminimalisasi adanya manajemen laba.

Untuk menguji hubungan antara independensi komite audit dan manajemen laba melalui perhitungan *discretionary accrual*, dilihat dari hasil uji T Regresi Linear Berganda. Pada hasil uji T tersebut harus menunjukkan nilai signifikansi < 5% atau 0.05, dengan kata lain independensi komite audit adalah berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

3. Frekuensi Pertemuan Komite Audit (X_3) dan Manajemen Laba (Y)

Adanya independensi yang baik akan semakin lengkap dan efektif dengan adanya keaktifan komite audit dalam mengadakan pertemuan. Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingansendiri.Dalam POJK NO.55/POJK.04/2015 menyebutkan bahwa “Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan”. Atau dengan kata lain, Frekuensi pertemuan komite audit adalah paling sedikit 4 kali dalam satu tahun.

Erna Widiastuty(2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara frekuensi pertemuan komite audit dengan manajemen laba. Semakin tinggi tingkat frekuensi pertemuan dapat meminimalisasi manajemen laba.

Untuk menguji hubungan antara ukuran komite audit dan manajemen laba melalui perhitungan *discretionary accrual*, dilihat dari hasil uji T Regresi Linear Berganda. Pada hasil uji T tersebut harus menunjukkan nilai signifikansi < 5% atau 0.05, dengan kata lain frekuensi pertemuan komite audit adalah berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3:Frekuensi Pertemuan Komite Audit berpengaruh negatif signifikanterhadapmanajemen laba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancangan penelitian adalah rencana dan struktur penelitian yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Desain penelitian ini dibuat untuk mengarahkan proses dan hasil penelitian yang valid, objektif, efisien, dan efektif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif.Menurut Purba dan Parulian Simanjuntak **: "Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara objektif".**[6]Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif.

Menurut Sugiyono **:**

> **"Penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".**[7]

3.2 Objek Penelitian

---

[6] Purba, Elvis dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian,** Edisi 1, Percetakan Sadia, Medan, 2011, Hal. 19

[7] Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, ALFABETA, Bandung, 2018, Hal. 8

Objek pada penelitian ini adalah karakteristik Komite Audit perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Periode penelitian dimulai dari tahun 2015-2018 sebagai tahun pengamatan.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian.

Menurut Suharsimi :**"Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian".**[8]Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015-2018.Jumlah populasi adalah 65 perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia.

3.3.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono:**"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut"**[9]**.** Metode Pengambilan sampel yang dilakukan adalah metode *purposive sampling* (pemilihan sampel berdasarkan tujuan), yaitu pemilihan sampel secara tidak acak tetapi menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Kriteria yang ditentukan dalam hal pengambilan sampel dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

---

[8]Suharsimi, Arikunto, **Prosedur Penelitian**, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal. 173
[9]Sugiyono, **Loc. Cit**, Hal. 81

1. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Busa Efek Indonesia periode tahun 2015-2018.
2. Perusahaanyang telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada periode 31 Desember 2015-2018.
3. Perusahaanyang tidak mengalami kerugian periode tahun 2015-2018
4. Perusahaan yang memiliki data laporan komite audit.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di atas, maka sampel penelitian sebanyak 30 perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia	59
Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel	29
Perusahaan yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sampel	30

Sumber :*www.idx.co.id*

Tabel 3.2
Nama-Nama Sampel Perusahaan

NO	Kode	Nama Perusahaan
1	AGII	PT. Aneka Gas Industri Tbk
2	ALDO	PT. Alkindo Naratama Tbk

3	AMFG	PT. Asahimas Flat Glass Tbk
4	ARNA	PT. Arwana Citra Mulia Tbk
5	BRPT	PT. Barito Pasific Tbk
6	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk
7	CPIN	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk
8	EKAD	PT. Ekadharma International Tbk
9	GDST	PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk
10	IGAR	PT. Champion Pasific Indonesia Tbk
11	IMPC	PT. Impack Pratama Industri Tbk
12	INAI	PT. Indal Aluminium Industry Tbk
13	INCI	PT. Intan Wijaya International Tbk
14	INKP	PT. Indah Kiat Pulp & paper Tbk
15	INTP	PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk
16	IPOL	PT. Indopoly Swakarta Industry Tbk
17	JPFA	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk
18	KDSI	PT. Kedawung Setia Industrial Tbk
19	LMSH	PT. Loinmesh Prima Tbk
20	MDKI	PT. Emdeki Utama Tbk
21	PBID	PT. Panca Budi Idaman Tbk
22	PICO	PT. Pelangi Indah Canindo Tbk
23	SMGR	PT. Semen Indonesia (persero) Tbk
24	SRSN	PT. Indo Acimata Tbk
25	SULI	PT. SLJ Global Tbk
26	TKIM	PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
27	TOTO	PT. Surya Toto Indonesia Tbk
28	TPIA	PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk
29	WSBP	PT. Waskita Beton precast Tbk
30	WTON	PT. Wijaya Karya Beton Tbk

Sumber :*www.idx.co.id*

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (Variabel Independen) dan Variabel Terikat (variabel dependen).

a. Variabel Dependen

Variabel terikat *(DependentVariable)* adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh Variabel Independen.Variabel Independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba.Pengukuran Manajemen Laba dilakukan dengan menggunakan Pendekatan *Discretionary Accrual (DA).*Penggunaan pendekatan *Discretionary Accrual (DA*) sebagai alat ukur Manajemen Laba dihitung dengan menggunakan *Modified Jones Model.*Untuk mendapatkan nilai *Discretionary Accrual* dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghitung nilai *Total Accrual* (TAC)

$$TAC_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan :

a) TAC_{it} = *Total accrual* perusahaan i pada periode t
b) N_{it} = Laba bersih perusahaan (net income) perusahaan i padaperiode t.
c) CFO_{it} = Arus kas operasi perusahaan *(Cash Flow From Operating Activities)* perusahaan i pada periode t.

2. Nilai *Total Accrual* (TAC) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS*(Ordinary Least Square)* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \frac{1}{A_{it} - 1} + \beta_2 \frac{\Delta REV_{it}}{A_{it} - 1} + \beta_3 \frac{PPE_{it}}{A_{it} - 1} + \epsilon$$

Keterangan :

a) TA_{it} = *Total Accrual* Perusahaan i pada periode t.
b) A_{it-1} = Total Aset perusahaan i pada periode t
c) ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan I antara periode dan periode t-1

d) PPE_{it} = Nilai aset tetap perusahaan i pada periode t.

3. Menghitung nilai *Nondiscretionary Accruals* (NDA) :

$$NDA_{it} = \beta_1 \frac{1}{A_{it} - 1} + \beta_2 \frac{\Delta REV_{it}}{A_{it} - 1} - \frac{\Delta REC_{it}}{A_{it} - 1} + \beta_3 \frac{PPE_{it}}{A_{it} - 1}$$

Keterangan :

a) NDA_{it} = *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode t

b) A_{it} = Total Aset perusahaan i pada periode t

c) ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan I antara periode dan periode t-1

d) ΔREC_{it} = Perubahan piutang perusahaan i antara periode t dengan periode t-1

e) PPE_{it} = Nilai asset tetap perusahaan i dengan periode t

4. Menghitung *Discretionary Accrual (DA)* dengan persamaan berikut :

$$DAC_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan :

a) DAC_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periodet

b) A_{it} = Total Aset perusahaan i pada periode t

c) TA_{it} = *Total Accrual* Perusahaan i pada periode t.

d) NDA_{it} =*Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode t.

b. Variabel Independen

Variabel independen (Variabel terikat) adalah tipe variabel yang mempengaruhi Variabel bebas (Variabel Independen).Dalam penelitian ini variabel independen yang

digunakan adalahUkuran Komite Audit, Independensi Komite Audit dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit.

3.4.2 Definisi Operasional Variabel

1. Ukuran Komite Audit

   Ukuran komite audit adalahjumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Ukuran Komite Audit diukur dengan menggunakan skala nominal, yaitu dengan menggunakan indikator ukuran komite audit (jumlah absolut) yang diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang tercantum dalam laporan perusahaan tersebut.Di dalam keputusan ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 poin (2) menyebutkan bahwa “Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik”. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa jumlah anggota Komite Audit adalah

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Ukuran Komite Audit dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{ACSIZE} = \text{Jumlah Komite Audit}$$

2. Independensi Komite Audit

Independensi Komite Audit dilihat dari seberapa banyak anggota komite audit yang berasal dari pihak luar atau tidak memiliki hubungan atau benturan kepentingan dengan pihak perusahaan. Independensi Komite Audit diukur dengan menggunakan Skala Rasio dengan metode analisis linear berganda.

$$\text{ACINDP} = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit independen}}{\text{Jumlah anggota komite audit}}$$

3. Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Frekuensi pertemuan komite audit merupakan jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh Komite Audit dalam waktu satu tahun. Dalam POJK NO.55/POJK.04/2015 menyebutkan bahwa “Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan”.Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah pertemuan Komite Audit adalah paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun.Frekuensi Komite Audit diukur dengan skala nominal yaitu dengan menghitung jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Audit dalam periode satu tahun.

$$\text{ACMEET} = \text{JumlahPertemuanAnggota Komite Audit dalam 1 Tahun}$$

Tabel 3.3
Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Defenisi	Pengukuran	Skala
1	Manajemen Laba (Y)	Upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakholders* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.	$DAC_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$	Rasio
2	Ukuran Komite Audit (X_1)	Jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan.	ACSIZE = Jumlah Komite Audit	Rasio
3	Independensi Komite Audit (X_2)	Seberapa banyak anggota komite audit yang berasal dari	ACINDP = Jumlah Komite Audit Independen / Jumlah	Rasio

		pihak luar atau tidak memiliki hubungan atau benturan kepentingan dengan pihak perusahaan.	Anggota Komite Audit	
4	Frekuensi Komite Audit (X_3	Jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh Komite Audit dalam waktu satu tahun.	ACMEET = Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit dalam 1 Tahun	Rasio

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data/menghimpun informasi kemudian mempelajari informasi tersebut berupa laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dengan mengunduh data laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018, serta studi pustaka dan penelitian terdahulu untuk mendapatkan teori-teori yang melatarbelakangi penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program komputer, yaitu *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) Versi 22. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut :

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahhui karakteristik sampel yang digunakan dalam menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian.Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah, sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian yang dilakukan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolenieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

3.6.2.1Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusinormal.Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk menghindari adanya hasil yang menyesatkan menggunakan grafik, maka uji grafik ini dilengkapi dengan uji statistik.Uji statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan uji non-parametik *Kolmogorov-Smirnov (K-S).* Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H0 : Data residual berdistribusi normal

H1 : Data residual tidak berdistribusi normal

Apabila nilai signifikansi lebih besar 5%, maka Ho diterima berarti data residual berdistribusi normal, ataupun sebaliknya.

3.6.2.2 Uji Multikolenieritas

Uji ini digunakan untuk situasi dimana adanya korelasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya.Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara masing-masing variabel bebas (independen).Apabila terjadi korelasi antar variabel-variabel tersebut, berarti terjadi problem multikolinearitas.Sedangkan variabel yang baik adalah variabel yang tidak memiliki problem multikolinearitas.Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai kolerasi antar variabel independen lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian tersebut.

3.6.2.3Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heterokedastitsitas.Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan antara lain Uji *Park*, Uji *Glejser*, *Scaterplot*, dan Uji Koefisien Korelasi *Spearman*.

Pada penelitian ini penulis menggunakan Uji Heterodastisitas dengan uji *Park*, yaitu metode yang digunakan dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat (Lne^2) dengan variabel independen (x_1 dan x_2). Adapun krieria pengujian adalah sebagai berikut :

1. H_0 : Tidak ada gejala Heterokedastisitas
2. H_a : Ada gejala Heterokedastisitas

H_0 diterima apabila Signifikansi > 0,05, berarti tidak terdapat gejala Heterokedastisitas dan H_0 ditolakbila Signifikansi < 0,05 yang berarti terdapat gejala Heterokedastisitas.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu, berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Pengujian asumsi uji Autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji *Run test*.Apabila hasil Uji Autokorelasi yang didapat menunjukkan tingkat Signifikansi <0,05 disimpulkan terdapat gejala autokorelasi pada model regresi tersebut. Dan sebaliknya, apabila nilai Sig > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadinya gejala Autokorelasi pada model regresi.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode Analisis Regresi Linear Berganda.Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.Analisis Regresi berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel terikat dengan satu atau variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.Analisis ini juga mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Pada Penelitian ini, model yang digunakan dalam regresi berganda untuk melihat pengaruh Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap Manajemen Laba dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3}$$

Keterangan:

Y = Manajemen Laba

α = Konstanta

b1,b2,b3 = Koefisien Regresi

X_1 = Ukuran Komite Audit

X_2 = Independensi Komite Audit

X_3 = Frekuensi Pertemuan Komite Audit

3.7 Pengujian Hipotesis

3.7.1 Uji Koefisien Determinasi *(R Square)*

Uji R^2 dilakukan dengan maksud untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. Sehingga akan diketahui seberapa besar variabel bebas akan mampu dijelaskan oleh variabel terikat, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Apabila nilai Koefisien Determinasi mendekati angka 1, maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.Sebaliknya apabila R^2 mendekati 0, maka semakin kecil pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.7.2 Uji T

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila koefisien regresi signifikansi pada t-signifikan ≤ 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, t-signifikan > 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.